

# Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2024

Elisa Oktriani<sup>1</sup>, Darmansyah<sup>2</sup>, Yudhi Lestanata<sup>3</sup>, Ilham Zitri<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

Corresponding Author: [oktrianielisa@gmail.com](mailto:oktrianielisa@gmail.com)

**Kata Kunci:**  
Kinerja, KPU,  
Partisipasi Politik  
Masyarakat

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan kajian teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu presiden 2024 memiliki 5 aspek yaitu pertama kualitas kerja, Kualitas kerja dari KPU Kota Mataram yaitu keberhasilannya dalam mengelola logistik, sumber daya manusia, dan infrastruktur pemilu, serta menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi pemilih dan pemantau pemilu. Kedua produktivitas, produktivitas KPU Kota Mataram yaitu melakukan pendataan pemilih, pengadaan logistik, dan sosialisasi kepada masyarakat seperti memberikan pemahaman terkait tahapan-tahapan pada pelaksanaan pemilu. Ketiga inisiatif, inisiatif dari KPU Kota Mataram yaitu melakukan edukasi pemilih secara langsung di komunitas-komunitas dan sekolah-sekolah, dalam rangka memberikan pemahaman terhadap pemilih pemula dan melakukan pelatihan intensif kepada petugas KPPS dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Keempat kerja sama, KPU Kota Mataram telah mengadakan kerja sama dengan pemerintah kota mataram dalam rangka memastikan dukungan logistik dan infrastruktur seperti, penyediaan TPS, pengamanan dan fasilitas kampanye, serta kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam berbagai kegiatan seperti, pemantauan TPS, pendidikan pemilih, dan pengawasan kampanye. Kelima tanggung jawab, tanggung jawab dari KPU Kota Mataram yaitu berupa menyampaikan laporan mengenai laporan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara kepada KPU NTB sampai KPU RI seperti data kehadiran pemantau dan saksi peserta pemilu di setiap TPS, serta laporan mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara seperti data perolehan suara masing-masing calon di tingkat kecamatan maupun kota.

**Keyword:**  
Performance,  
KPU, Community  
Political Participation

**Abstract:** This study was conducted to determine the performance of the Mataram City General Election Commission in increasing public political participation in the 2024 presidential election. The research method used is qualitative with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through interviews, documentation, and theoretical studies. The results of this study indicate that the performance of the Mataram City General Election Commission in increasing public political participation in the 2024 presidential election has 5 aspects, namely the first quality of work, the quality of work of the Mataram City KPU, namely its success in managing logistics, human resources, and election infrastructure, as well as providing effective complaint channels for voters and election observers. Second productivity, the productivity of the Mataram City KPU, namely conducting voter data collection, procurement of logistics, and socialization to the community such as providing an understanding of the stages in the implementation of the election. Third initiative, the initiative of the Mataram City KPU, namely conducting direct voter education in communities and schools, in order to provide understanding to new voters and conduct intensive training for KPPS officers in increasing capacity and professionalism. Fourth cooperation, the

---

*Mataram City KPU has collaborated with the Mataram city government in order to ensure logistical and infrastructure support such as the provision of polling stations, security and campaign facilities, as well as cooperation with community organizations (ORMAS) and non-governmental organizations (NGOs) in various activities such as monitoring polling stations, voter education, and campaign supervision. Fifth responsibility, the responsibility of the Mataram City KPU is to submit reports on the implementation of voting and vote counting to the NTB KPU to the RI KPU such as data on the presence of observers and witnesses for election participants at each polling station, as well as reports on the recapitulation of vote counting results such as data on the acquisition of votes for each candidate at the sub-district and city levels.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan Umum di Indonesia diselenggarakan secara mandiri, tetap, dan nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dikenal sebagai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di masing-masing wilayah tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu mengatur posisi panitia pemilihan, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Untuk memastikan bahwa pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, panitia tersebut memainkan peran penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum.

Menurut Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2011, mengatur "Akuntabilitas KPU" diperlukan untuk memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dan mendukung pemilu yang bersih, jujur, dan adil yang sesuai dengan semangat demokrasi dan kearifan lokal kedudukan nasional Indonesia. Selain itu, Undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Komisi Pemilihan Umum menyelenggarakan kegiatan kehumasan mengenai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, atau penyelenggaraan Pemilu yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bupati Umum/KPU. Juga ditetapkan bahwa Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Panitia Pemilihan Umum akan merancang program yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat lokal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Partisipasi politik adalah keinginan seseorang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif, menggunakan hak bersuara, berpartisipasi dalam berbagai organisasi, berbicara tentang masalah politik dengan orang lain, ikut serta dalam berbagai gerakan dan aksi, bergabung dengan partai politik atau organisasi independen, berpartisipasi dalam kampanye penyadaran, memberikan pendidikan politik, dan memberikan pendidikan politik. (Muhaling, 2014).

Miriam Budiarto menjelaskan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara dan mempengaruhi kebijakan secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti menghadiri rapat umum, berpartisipasi dalam partai atau kelompok kepentingan, berhubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan memberikan suara dalam pemilihan umum. Ramlan Surbakti menggambarkan partisipasi politik sebagai tindakan umum warga negara untuk memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan ikut menentukan pemimpin pemerintahan. (Sastrawati, 2019)

Pada dasarnya, partisipasi politik masyarakat dapat menjadi cara bagi masyarakat untuk mengontrol bagaimana pemerintah yang akan terpilih berjalan. Masyarakat berhak untuk memilih dan memberikan amanahnya kepada orang-orang yang layak dan dapat dipercaya untuk mengelola pemerintahan berikutnya. Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga dapat menjadi cara untuk menunjukkan eksistensi individu atau kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui mekanisme politik. (Putri, 2016)

Pada pemilu serentak tahun 2019, KPU Kota Mataram mencatat jumlah partisipasi pemilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPDRI, DPRRI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten sebanyak 222.687 suara dari jumlah DPT sebanyak 278.358. Dari semua pemilih yang terdaftar di DPT, kecamatan Ampenan memiliki tingkat partisipasi tertinggi, dengan 49.134 suara dari 57.202 pemilih yang terdaftar di DPT. Ini menunjukkan bahwa total partisipasi masyarakat pada pemilu serentak tahun 2019 adalah 80% dari target nasional 77% (antaraNTB, 03/05/2019).

Meskipun demikian, tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2020 menurun, hanya mencapai 67,2% dari target 80% yang ditetapkan oleh KPU Kota Mataram. Menurut data yang dirilis oleh KPU Kota Mataram, ada 203.314 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari total 305.824 pemilih yang tersebar di enam kecamatan. (kpu.go.id diakses tanggal 23 Juli 2022, pukul 03:18 WITA)

Hasil pemilihan serentak 2019 menghasilkan 222.687 suara dari jumlah DPT sebanyak 278.358 (80%), sementara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2020 menghasilkan 203.314 suara dari jumlah DPT sebanyak 305.824 jiwa (67,2%). Oleh karena itu, KPU Kota Mataram akan berusaha untuk meningkatkan kembali partisipasi masyarakat di pemilu serentak tahun 2024 dari tujuan yang telah ditetapkan sebesar 75%. (kpu.go.id diakses tanggal 24 Juli 2022, 23:17 WITA)

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana KPU Kota Mataram berhasil meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan melihat karakteristik pemilih dari usia muda hingga lanjut usia. Oleh karena itu, masyarakat Kota Mataram tidak akan

ragu lagi untuk mengambil bagian dalam pemilihan di setiap TPS yang disediakan oleh KPU Kota Mataram. Dengan demikian, KPU Kota Mataram akan dapat menyelesaikan masalah partisipasi politik masyarakat pada pemilu tahun 2024. (kpu.go.id diakses tanggal 25 Juli 2022, pukul 15:39 WITA)

### **METODELOGI PENELITIAN**

Peneliti menggunakan metode kualitatif untuk menyusun hasil penelitian ini dan menggunakan pendapat para ahli untuk mendefinisikan penelitian ini. Menurut metodologi, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena objek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara keseluruhan dan dengan kata-kata. (Rukin, 2019)

Menurut Sugiyono (2019:18), metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang berbasis pada filsafat postpositivisme (khususnya fenomenologi), dan digunakan untuk meneliti kondisi ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya. Metode pengumpulan data dan analisis kualitatif lebih menekankan pada makna deskriptif dan biasanya menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna lebih diperhatikan. Fokus penelitian disesuaikan dengan data lapangan dengan menggunakan landasan teori.

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan komisioner dan staf dari KPU Kota Mataram, dan melakukan dokumentasi berupa catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Pertama peneliti melakukan reduksi data dengan proses penyederhanaan dan penggolongan data, artinya peneliti hanya mengambil data yang diperlukan. Sehingga data yang didapatkan menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan proses terakhir yaitu mengambil kesimpulan. Kedua peneliti melakukan Penyajian data yaitu dengan mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Ketiga peneliti melakukan verifikasi data dengan dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data.

## PEMBAHASAN

### **Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram**

Kinerja komisi pemilihan umum kota mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilihan presiden 2024 memiliki lima aspek antara lain:

Aspek pertama yaitu kualitas kerja KPU Kota Mataram, KPU kota mataram telah berhasil memfasilitasi proses pemilihan dengan baik di seluruh TPS, serta kemampuan KPU kota mataram dalam mengelola logistik, sumber daya manusia, dan infrastruktur pemilu dinilai efektif. Selain itu KPU kota mataram telah melakukan persiapan teknis kepada masyarakat sebelum pemilu dilaksanakan termasuk pendataan pemilih, pengadaan logistik pemilu, dan pelatihan petugas TPS. KPU Kota Mataram juga sudah menjalankan distribusi logistik pemilu keseluruhan TPS di Kota Mataram supaya berjalan lancar dan tepat waktu dan KPU Kota Mataram juga telah menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi pemilih dan pemantau pemilu, sehingga pengaduan yang masuk pada saat pemilu dapat ditangani dengan cepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aspek kedua yaitu produktivitas KPU Kota Mataram, produktivitas yang sudah dilakukan oleh KPU kota mataram yaitu cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pendataan pemilih, pengadaan logistik, dan sosialisasi kepada masyarakat yang berjalan dengan lancar dan tepat waktu, serta pada waktu pemungutan suara KPU Kota Mataram berhasil mengkoordinasikan pelaksanaan di seluruh TPS dengan baik dan proses perhitungan suara sampai pada rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kota dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Selain itu KPU kota mataram juga telah melakukan pembaruan sistem dan infrastruktur mengenai teknologi informasi untuk mendukung proses penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan efisien, yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui informasi mengenai pelaksanaan pemilu Tahun 2024.

Aspek ketiga yaitu inisiatif KPU Kota Mataram, inisiatif dari KPU kota mataram pada pemilu tahun 2024 yaitu Pertama, melakukan edukasi pemilih secara langsung di komunitas-komunitas dan sekolah-sekolah, dalam rangka memberikan pemahaman terhadap pemilih pemula yang lebih baik dalam menentukan hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Kedua, melakukan pelatihan intensif kepada petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme. Ketiga, mengembangkan platform digital agar memudahkan masyarakat atau pemilih untuk mengakses informasi seputar proses pemungutan suara, daftar calon, dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) kepada masyarakat. Dalam hal ini platform digital atau media sosial yang dimaksud adalah Instagram, Facebook, Twitter, dan Tiktok. Platform digital dan media online tersebut digunakan untuk memaksimalkan penyebaran informasi terkait pemilu kepada masyarakat, serta melalui penyebaran informasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat

mengenai pemilu dan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu di kota mataram tahun 2024.

Aspek keempat kerja sama KPU Kota Mataram, KPU Kota Mataram telah mengadakan kerja sama dengan pemerintah kota mataram dalam mewujudkan pemilu yang damai dan aman, serta kerja sama dengan pemerintah kota mataram dilakukan untuk memastikan dukungan logistik dan infrastruktur seperti, penyediaan TPS, pengamanan dan fasilitas pendukung lainnya. KPU Kota Mataram juga mengadakan kerja sama dengan partai politik, dalam rangka mengadakan diskusi mencakup pembahasan persiapan, verifikasi calon, dan memastikan proses kampanye berjalan sesuai aturan. Selain itu juga KPU kota mataram melakukan kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam berbagai kegiatan seperti, pemantauan TPS, pendidikan pemilih, dan pengawasan kampanye. KPU Kota Mataram juga melakukan kerja sama dengan Bawaslu Kota Mataram dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Aspek kelima yaitu tanggung jawab KPU Kota Mataram, tanggung jawab KPU kota mataram dalam menyelenggarakan pemilu 2024 yaitu berupa tanggung jawab struktural kepada KPU NTB sampai kepada KPU RI dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seperti terus melakukan koordinasi dan pelaporan mengenai laporan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara kepada KPU NTB sampai KPU RI. Laporan tersebut berupa data kehadiran pemantau dan saksi peserta pemilu di setiap TPS dan data mengenai kejadian-kejadian penting selama proses pemungutan dan perhitungan suara, serta laporan mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara, seperti data perolehan suara masing-masing calon di tingkat kecamatan maupun kota, dan data mengenai persentase suara sah yang diperoleh masing-masing calon pada pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024.

### **Faktor yang mempengaruhi kinerja KPU kota mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat**

Faktor yang mempengaruhi kinerja KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, yang dimana dalam faktor internal antara lain: pertama yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dikarenakan ketika semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin luas pengetahuan masyarakat terhadap pemilu. Selain itu KPU kota mataram akan melakukan sosialisasi yang sifatnya memberikan edukasi terkait pemilu kepada masyarakat khususnya yang tingkat pendidikannya rendah. Sosialisasi tersebut dilakukan supaya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dapat mengetahui sedikit-tidaknya mengenai pemilu. Kedua yaitu kesadaran politik, kesadaran politik dalam memberikan hak suaranya pada saat pencoblosan, serta memiliki kesadaran politik dalam mengawal setiap proses pelaksanaan pemilu tahun 2024. Disamping itu Kesadaran

politik menjadi tonggak utama dalam mempengaruhi kinerja KPU kota mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu lebih khususnya pilpres di kota mataram tahun 2024.

Selain itu tidak hanya dari faktor internal, melainkan adapun juga dari faktor eksternal yaitu antara lain: pertama peranan pemerintah, pemerintah Kota Mataram memiliki peran dalam memberikan dukungan moril maupun materil terhadap pelaksanaan pemilu. Khususnya pemerintah kota mataram juga akan berperan dalam memberikan bantuan kendaraan operasional, kelancaran distribusi logistik, penanganan trantribun dan penugasan personil linmas, serta memiliki peran untuk memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagai upaya mencapai pemilu yang demokratis. Kedua yaitu peranan partai politik, partai politik memiliki peran dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, seperti memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dan melahirkan pemuda-pemuda yang berkualitas pada masa pemilu tahun 2024. Disamping itu juga Partai politik dituntut untuk terus melakukan Pendidikan politik dan melakukan sosialisasi politik terutama pada pemuda dan simpatisanya, serta partai politik memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan calon pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas yang bagus, yang dimana pada akhirnya dapat mendorong pemilih atau masyarakat untuk memilih calon yang diajukan oleh partai politik.

## KESIMPULAN

Kualitas kerja dari KPU Kota Mataram dapat dilihat dari keberhasilannya Komisioner dan Staff KPU Kota Mataram dalam memfasilitasi proses pemilihan dengan baik di seluruh TPS, serta kemampuan staff KPU Kota Mataram dalam mengelola logistik, sumber daya manusia, dan infrastruktur pemilu yang dinilai sudah efektif. KPU Kota Mataram juga telah menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi pemilih dan pemantau pemilu yang dapat diakses melalui jejaring media seperti Wbsite, Instagram, Twitter, dan facebook dari KPU Kota Mataram. Produktivitas dari KPU Kota Mataram dapat dilihat dari proses pendataan pemilih, pengadaan logistik, dan sosialisasi kepada masyarakat seperti memberikan pemahaman terkait tahapan-tahapan pada pelaksanaan pemilu, yang dianggap berhasil berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Pada waktu pemungutan suara KPU Kota Mataram juga telah berhasil mengkoordinasikan pelaksanaan di seluruh TPS dengan baik dan proses perhitungan suara sampai pada rekapitulasi hasil pemilu di tingkat kota dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Pada waktu terselenggaranya pemilu KPU Kota Mataram juga memiliki inisiatif berupa melakukan edukasi pemilih secara langsung di komunitas-komunitas dan sekolah-sekolah, dalam rangka memberikan pemahaman terhadap pemilih pemula yang lebih baik dalam menentukan hak dan kewajibannya sebagai pemilih. Melakukan pelatihan intensif kepada petugas KPPS untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme, serta memiliki inisiatif dalam mengembangkan platfrom digital agar memudahkan masyarakat atau pemilih untuk mengakses informasi seputar proses pemungutan suara, daftar calon, dan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) kepada masyarakat. Disamping itu juga KPU Kota Mataram telah mengadakan kerja sama dengan pemerintah kota mataram dalam rangka memastikan dukungan logistik dan infrastruktur seperti, penyediaan TPS, pengamanan dan fasilitas pendukung lainnya, Serta melakukan kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam berbagai kegiatan seperti, pemantauan TPS, pendidikan pemilih, dan pengawasan kampanye.

KPU kota mataram melakukan tanggung jawab yaitu berupa menyampaikan pelaporan mengenai laporan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara kepada KPU NTB sampai KPU RI. Laporan yang dimaksud seperti data kehadiran pemantau dan saksi peserta pemilu di setiap TPS, serta laporan mengenai rekapitulasi hasil perhitungan suara, seperti data perolehan suara masing-masing calon di tingkat kecamatan maupun kota, dan data mengenai persentase suara sah yang diperoleh masing-masing calon pada pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024.



Tingkat pendidikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja KPU Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, dikarenakan ketika semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin luas pengetahuan masyarakat terhadap pemilu. Selain itu KPU kota mataram telah mengadakan sosialisasi yang sifatnya memberikan edukasi terkait pemilu kepada masyarakat khususnya yang tingkat pendidikannya rendah. Sosialisasi tersebut dilakukan supaya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah dapat mengetahui sedikit-tidaknya mengenai tahapan-tahapan pemilu. Kesadaran politik juga menjadi tonggak utama dalam mempengaruhi kinerja KPU kota mataram dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan pemilu lebih khususnya pilpres di kota mataram tahun 2024, Langkah-langkah yang dilakukan KPU Kota Mataram dalam memberikan kesadaran politik mengenai pemilu yaitu melakukan sosialisasi secara langsung seperti melakukan sosialisasi tatap muka dengan masyarakat dan melakukan sosialisasi tidak langsung seperti menyebarkan informasi melalui media online.

Pemerintah Kota Mataram juga memiliki peranan dalam memberikan dukungan moril maupun materil terhadap pelaksanaan pemilu seperti memberikan bantuan kendaraan operasional, kelancaran distribusi logistik, penanganan trantribun dan penugasan personil linmas, serta memiliki peran untuk memberikan bantuan dan fasilitas untuk kelancaran penyelenggaraan pemilu sebagai upaya mencapai pemilu yang demokratis. Dilain sisi Peranan partai politik juga dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, seperti memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat dan melahirkan pemuda-pemuda yang berkualitas. Selain itu juga pada pelaksanaan pemilu di Kota Mataram, partai politik dituntut untuk terus melakukan pendidikan politik dan melakukan sosialisasi politik terutama pada pemuda dan simpatisannya, serta partai politik memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan calon pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas yang bagus, yang dimana pada akhirnya dapat mendorong pemilih atau masyarakat untuk memilih calon yang diajukan oleh partai politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussyakur, Okianna, & Budi Utomo, B. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2009. *Social Science Journal*, 1(3), 1-8.
- Ansori, A. (2018). Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 553.
- Andayani, S., Zitri, I., & Darmansyah, D. (2024). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi dana desa terhadap tingkat kepercayaan masyarakat di kelurahan Punia Mataram. *Journal Law and Government*, 2(1), 8-19.
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2016). Teori Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara. *NBER Working Papers*, 89.
- Budiardjo, M, dkk. (2014). Pengantar Ilmu Politik. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Cangara, H. (2011). Komunikasi Politik: konsep, teori. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewantara, A. J. (2019). Sistem Politik Dan Demokrasi Indonesia. Jember, Jawa Timur: CV, Pustaka Abadi.
- Efriza & Agung Suprojo. (2018). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. 1, 6.
- Entong, A. T. C. S., & Anggraeni, D. (2020). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pendetang Pada Pilpres 2019 Di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. *Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 12(4), 753-774.
- Firmansyah. (2015). Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas. Edisi Kedua. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Gaffar, A. (2004). Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Gleko, P., Suprojo, A., & Lestari, A. W. (2017). Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 40.
- Hadi, A., Hidayat, R., & Alwi, L. N. (2020). PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DI KOTA MATARAM. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 6(2).
- Hidayatullah, F., & Rahman Makkatuo, A. (2022). Strategi Politik Pasangan Irianto Lambrie Dan Udin Hianggio Pada Pilkada Kalimantan Utara Tahun 2015. 10, 169-178.
- Kodi, D. (2021). Demokrasi Dan Budaya Politik Indonesia.
- Kurniawan, D. (2015). Kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Penyelenggaraan Pilpres 2014 di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 1225-1239.
- Labolo, M. (2015). Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis. Jakarta: Rajawali Pers.

- M Samsudin, M. S. (2022). Partisipasi pemilih pemula di Lingkungan Selagalas Lama pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2020 (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Muhaling, A. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Sitaro. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2).
- Muhtadin, M. (2023). Politik Hukum Partai Politik dan Pemilihan Umum. *Ahkam*, 2(2), 210–232.
- Nilamsari, P. N. (2018). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Kabupaten Luwu.
- Pagisi, E. I. (2021). Pengaruh Disiplin Kerja, Kompetensi Dan Produktivitas Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Ekonomi Trend*, 9(1), 479–488.
- Pito Andrianus, T. dkk. (2006). *Mengenal Teori-teori Politik*. Bandung: Nuansa.
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 30.
- Refly Harun. (2019). disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers “Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang Berintegritas.”
- Sahroni, A. (2021). Konflik Kelembagaan Antara Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sengketa Proses Pemilu Di Pemilihan Umum Serentak 2019.
- Salusa. (2015). Peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam pendidikan politik. 64.
- Sastrawati, N. (2019). Partisipasi politik dalam konsepsi teori pilihan rasional James S Coleman. *Al-Risalah*, 19(2), 187-197.
- Sugiyono. (2019). *Konseptual Variabel dalam Penelitian Kuantitatif*. 15–22.
- Solihah, dkk. (2018). *Jurnal Wacana Politik*. 1, 3. UUD 1945 Amandemen pasal 22E.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57-62.
- Zulkarnaen, W., Dewi Fitriani, I., Sadarman, B., Yuningsih, N., Muhammadiyah Bandung, S., & Tasikmalaya, S. (2020). Evaluasi Kinerja Distribusi Logistik KPU Jawa Barat Sebagai Parameter Sukses Pilkada Serentak 2018.
- Zitri, I., Amil, A., & Lestanata, Y. (2024). Policy Communication on Twitter Social Media: Development of Sustainable Tourism Destinations in West Nusa Tenggara. *Jurnal Public Policy*, 10(1), 34-43.
- Naqiah, A., & Zitri, I. (2023). Collective Action Kelompok Sadar Wisata Desa Malaka Dalam Percepatan Pariwisata Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 3(1), 1-14.

- Zitri, I., Rosiastawa, A., & Hadi, A. (2023). Mencapai Target Sustainable Development Goals (Sdg's) Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021. *Journal Of Social And Policy Issues*, 41-45.
- Zitri, I., Rifaid, R., & Lestanata, Y. (2022). Implementation Of E-Government Policy From Governor Muhammad Zainul Madji (Tgb) Era To Governor Zulkieflimansyah Era In West Nusa Tenggara Province. *Aristo*, 11(1), 146-172.
- Zitri, I., Amil, A., & Lestanata, Y. (2024). Policy Communication on Twitter Social Media: Development of Sustainable Tourism Destinations in West Nusa Tenggara. *Jurnal Public Policy*, 10(1), 34-43.
- Zitri, I., Rifaid, R., Lestanata, Y., & Kurniawan, C. (2024). Navigating digital tourism governance: a case study of branding strategies in the Mandalika special economic zones. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(1), 148-159.